



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Tata Negara	7420903010	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=0 P=0 ECTS=0	2	30 Januari 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi
	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.		Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.		Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.

Model Pembelajaran	Project Based Learning
--------------------	------------------------

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
---------------------------	-----------------------------------

CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-5	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum
CPL-6	Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil dan formil.
CPL-8	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya yang dituangkan baik dalam lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik
CPL-9	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.
CPL-10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji/implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
---	--

CPMK - 1	Mahasiswa memahami fondasi Hukum Tata Negara
CPMK - 2	mahasiswa memahami Struktur Ketatanegaraan
CPMK - 3	Mahasiswa memahami dinamika dan isu kontemporer

Matrik CPL - CPMK	
-------------------	--

	CPMK	CPL-3	CPL-5	CPL-6	CPL-8	CPL-9	CPL-10
CPMK-1	✓	✓	✓				
CPMK-2	✓	✓	✓				
CPMK-3	✓				✓	✓	✓

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
--	--

	CPMK	Minggu Ke															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✓	✓	✓	✓	✓											
CPMK-2							✓	✓	✓	✓	✓	✓					
CPMK-3														✓	✓	✓	✓

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini merupakan pengenalan tentang sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, hak asasi manusia, lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD dan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta hubungan antara pusat dan daerah dan pengaturan HAM sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.
----------------------	---

Pustaka	Utama :
---------	---------

1. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005
2. A.C. Kapur, Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD
3. Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press
4. Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press
5. Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher

Pendukung :

Dosen Pengampu

Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.
 Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
 Anisa Deny Setiawati, S.H., M.H.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.Memahami pengertian hukum tata negara 2.Menjelaskan hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi	1.Mahasiswa mampu memahami pengertian hukum tata negara 2.Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		Materi: Memahami pengertian hukum tata negara Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i> Materi: Mahasiswa mampu memahami pengertian hukum tata negara Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i> Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i>	3%

2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu mendefinisikan negara, hukum, dan konstitusi; 2. Menjelaskan fungsi dan peran masing-masing; 3. Menganalisis hubungan antara negara, hukum, dan konstitusi. 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50	<p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya.</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya.</p> <p>Pustaka: <i>A.C. Kapur, Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD</i></p> <hr/> <p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya.</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid 1, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya.</p> <p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	3%
---	---	--	--	--	---	----

3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu mendefinisikan negara, hukum, dan konstitusi; 2. Menjelaskan fungsi dan peran masing-masing; 3. Menganalisis hubungan antara negara, hukum, dan konstitusi. 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50	<p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya. Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya. Pustaka: <i>A.C. Kapur, Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD</i></p> <hr/> <p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid 1, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, serta hubungan antara ketiganya. Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	3%
---	---	--	--	--	---	----

4	Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan; 2. Mengidentifikasi contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 3. Menganalisis hubungan antar prinsip-prinsip tersebut. 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2x50		<p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	3%
---	--	--	--	--	--	---	----

5	Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan; 2. Mengidentifikasi contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 3. Menganalisis hubungan antar prinsip-prinsip tersebut. 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Sedang 3. Buruk <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2x50		<p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, termasuk prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.</p> <p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	3%
---	--	--	--	--	--	---	----

6	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945.	<p>1.Mendeskrripsikan struktur dan fungsi Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK;</p> <p>2.Menganalisis hubungan antar lembaga negara.</p>	<p>Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	3%
---	--	--	---	---------------------------------------	--	---	----

7	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945.	<p>1.Mendeskripsikan struktur dan fungsi Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK;</p> <p>2.Menganalisis hubungan antar lembaga negara.</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Sedang 3.Buruk</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945</p> <p>Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	4%
8	Ujian Tengah Semester	Mampu mengerjakan soal UTS dengan baik dan benar	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes 60		<p>Materi: Konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara, Prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan. Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara</p> <p>Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum</i></p>	19%

Tata Negara
Indonesia, 2005

Materi: Prinsip negara hukum, demokrasi, dan pemisahan kekuasaan.

Pustaka: Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press*

Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Pustaka: Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher*

Materi: Struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Pustaka: Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press*

Materi: Konsep dasar negara, hukum, dan konstitusi, prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara

Pustaka: A.C. Kapur, *Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD*

9	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan prinsip otonomi daerah; 2. Mendeskripsikan struktur pemerintahan daerah; 3. Menganalisis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: prinsip otonomi daerah Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: struktur pemerintahan daerah Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	4%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan prinsip otonomi daerah; 2. Mendeskripsikan struktur pemerintahan daerah; 3. Menganalisis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: prinsip otonomi daerah Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: struktur pemerintahan daerah Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	4%

11	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perubahan UUD 1945.	<p>1.Mendeskripsikan tahapan dan prosedur perubahan UUD 1945;</p> <p>2.Menganalisis dampak perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.</p>	<p>Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Prosedur perubahan UUD Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Prosedur perubahan UUD Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Prosedur perubahan UUD Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	4%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perubahan UUD 1945.	<p>1.Mendeskripsikan tahapan dan prosedur perubahan UUD 1945;</p> <p>2.Menganalisis dampak perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.</p>	<p>Kriteria: 1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Prosedur perubahan UUD Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Prosedur perubahan UUD Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Prosedur perubahan UUD Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	4%

13	Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu kontemporer terkait Hukum Tata Negara di Indonesia.	<p>1.Mengidentifikasi isu-isu kontemporer seperti korupsi, HAM, dan otonomi daerah;</p> <p>2.Menganalisis isu-isu tersebut dari perspektif Hukum Tata Negara.</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: A.C. Kapur, <i>Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	5%
----	--	---	--	--	--	---	----

14	Mahasiswa mampu merumuskan solusi terhadap permasalahan ketatanegaraan dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara.	<p>1. Merumuskan solusi atas studi kasus terkait isu-isu ketatanegaraan;</p> <p>2. Mempresentasikan solusi tersebut dengan argumentasi yang kuat.</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <hr/> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: A.C. Kapur, <i>Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD</i></p> <hr/> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <hr/> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	4%
----	--	---	--	--	--	---	----

15	Mahasiswa mampu melakukan refleksi kritis terhadap perkembangan dan dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia.	<p>1.Melakukan evaluasi kritis terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara</p> <p>2.Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem ketatanegaraan.</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Baik 2.Cukup 3.Kurang</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2X50		<p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: A.C. Kapur, <i>Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i></p> <p>Materi: Prinsip-prinsip Hukum Tata Negara dan sistem ketatanegaraan. Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i></p>	7%
----	--	--	--	--	--	---	----

16	Ujian Akhir Semester	Mampu mengerjakan UAS dengan baik dan benar	Kriteria: 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang Bentuk Penilaian : Tes	Tes 60	Materi: Teori dan prinsip Hukum Tata Negara Pustaka: <i>Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005</i> Materi: Teori dan prinsip Hukum Tata Negara Pustaka: <i>A.C. Kapur, Principles Of Political Science, 2005, S. Chand & Company LTD</i> Materi: Teori dan prinsip Hukum Tata Negara Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i> Materi: Teori dan prinsip Hukum Tata Negara Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid I, 2006, Konstitusi Press</i> Materi: Teori dan prinsip Hukum Tata Negara Pustaka: <i>Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Jilid II, 2006, Konstitusi Press</i> Materi: Teori dan prinsip Hukum Tata Negara Pustaka: <i>Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, 2008, Cerdas Pustaka Publisher</i>	27%
----	----------------------	---	--	-----------	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	50.5%
2.	Penilaian Portofolio	3.5%
3.	Tes	46%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 6 Februari 2025

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum (Kampus
Kabupaten Magetan)



Syahid Akhmad Faisol, S.H.,
M.H.
NIDN 0012119305

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum (Kampus Kabupaten
Magetan)



Anisa Deny Setiawati, S.H.,
M.H.
NIDN 0026129304

File PDF ini digenerate pada tanggal 6 April 2025 Jam 00:22 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

